

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENGATASI KESENJANGAN AKSES PENDIDIKAN DI KABUPATEN
PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

APRI CAHYATI LESTARI

2416041104

Reguler C



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teori	13
2.2.1 <i>Grand Theory</i> : Kebijakan Publik.....	13
2.2.2 <i>Middle Theory</i> : Teori Kebijakan Publik	15
2.2.3 <i>Applied Theory</i> : Teori Implementasi	16
2.3 Kajian Konseptual.....	17
2.3.1 Akses Pendidikan.....	17
2.3.2 Kesenjangan Akses Pendidikan	19
2.3 Kerangka Pikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Tipe Penelitian	22
3.2 Fokus Penelitian.....	22
3.3 Lokasi Penelitian.....	24
3.4 Jenis dan Sumber Penelitian	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.6 Teknik Analisis Data.....	27
3.7 Teknik Keabsahan Data	28
DAFTAR PUSTAKA.....	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam pembangunan bangsa. Pendidikan juga dipandang sebagai aspek penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan global. Pendidikan harus dijadikan fondasi bangsa untuk maju dan sejahtera. Di Indonesia, pentingnya pendidikan bahkan tercantum secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menempatkan pendidikan sebagai bagian dari tujuan bernegara.

Pendidikan berfungsi sebagai media penyampaian nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta persatuan nasional. Tantangan globalisasi berupa masuknya budaya asing, melemahnya nilai moral, hingga ancaman perpecahan bangsa, menjadikan pendidikan berperan sebagai salah satu benteng pertahanan. Melalui pendidikan yang berkualitas, generasi muda tidak hanya dibekali dengan pengetahuan teknis, tetapi juga dengan kesadaran kritis, cinta tanah air, serta komitmen pada persatuan bangsa. Tanpa adanya pendidikan yang menanamkan nilai kebersamaan, potensi konflik dan perpecahan dalam bangsa dapat terjadi.

Pendidikan dapat dipandang sebagai investasi bangsa dalam jangka panjang. Keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dicapai secara instan, melainkan melalui proses panjang dengan mencetak generasi yang unggul. Pendidikan menjadi penggerak utama yang akan menentukan sejauh mana Indonesia berkembang menjadi negara maju. Dalam UUD 1945 sudah jelas menempatkan pendidikan sebagai tujuan negara, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk abai terhadap sektor ini. Pemerataan akses, peningkatan kualitas, dan penguatan nilai kebangsaan melalui pendidikan harus menjadi prioritas utama.

Sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan memegang peran utama dalam pembangunan nasional. Apabila terjadi kesalahan dalam proses

perumusan ataupun implementasi kebijakan pendidikan, akibat yang ditimbulkan dapat bersifat fatal, apalagi bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Pernyataan ini menjadi penting ketika dikaitkan dengan realitas pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), seperti Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. Pengawasan implementasi kebijakan pemerintah daerah pada daerah 3T sangat penting untuk menilai sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan layanan pendidikan yang adil dan merata, sekaligus melihat kendala yang masih menghambat tujuan dalam pemerataan pendidikan (Hasbullah, 2015).

Selain itu, pendidikan juga menjadi salah satu aspek penting dalam menghadapi tantangan di era digital. Perkembangan teknologi informasi menuntut sumber daya manusia di Indonesia untuk memiliki literasi digital, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Jika tidak dipersiapkan dengan baik melalui pendidikan yang relevan, bangsa Indonesia akan semakin tertinggal dibandingkan negara lain. Pemerintah telah berupaya melakukan berbagai gagasan baru, seperti penerapan Merdeka Belajar, penggunaan modul digital, hingga penyediaan beasiswa. Akan tetapi, tantangan pemerataan tetap menjadi salah satu permasalahan besar, terutama di daerah-daerah 3T yang sering terabaikan dari arus pembangunan.

Pendidikan harus dipandang sebagai hak asasi manusia sekaligus sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Arah pembangunan pendidikan nasional tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas individu, tetapi juga pada pemerataan akses agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati layanan pendidikan. Penting untuk tahu bagaimana kebijakan pendidikan dijalankan, apakah sudah sesuai dengan amanat pemerataan dan keadilan sosial atau justru masih menimbulkan kesenjangan baru (Soedijarto, 2008).

Hingga saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius dalam upaya pemerataan pendidikan. Kesenjangan kualitas pendidikan menjadi masalah

yang terus berulang, terutama antara wilayah perkotaan dengan daerah terpencil. Ketimpangan pendidikan masih menjadi salah satu masalah utama di Indonesia. Meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya, implementasinya belum optimal, terutama di daerah 3T. Kondisi ini membuat kualitas pendidikan di Indonesia semakin tertinggal di tengah derasnya arus globalisasi. Keterbatasan sarana prasarana, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, serta minimnya infrastruktur sekolah menjadi faktor yang menghambat peningkatan mutu pendidikan di wilayah-wilayah tertentu. Keadaan ini tidak hanya berdampak pada rendahnya angka partisipasi sekolah, tetapi juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan (Putera & Rhussary, 2018).

Salah satu hambatan utama pendidikan di daerah 3T adalah kondisi geografis yang sulit dijangkau, sehingga berdampak pada rendahnya angka partisipasi sekolah. Ketersediaan fasilitas pendidikan dan kualitas tenaga pendidik yang masih belum merata juga menjadi hambatan. Banyak sekolah di daerah 3T yang masih kekurangan ruang belajar, guru, bahkan infrastruktur dasar seperti listrik dan internet. Kemudian kualitas tenaga pendidik masih belum setara (Ananda, et al., 2025). Selain itu, faktor sosial dan ekonomi turut memperbesar kesenjangan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu biasanya mengalami hambatan dalam melanjutkan pendidikan, terutama saat biaya kebutuhan sekolah dianggap membebani. Padahal pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program beasiswa, tapi pada nyatanya masih terdapat banyak siswa di beberapa daerah yang terpaksa putus sekolah karena alasan ekonomi.

Kebijakan pembangunan daerah tertinggal pada dasarnya diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah melalui kebijakan berpihak, percepatan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Program prioritas yang dapat dilakukan pemerintah daerah seperti pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur dan sarana, pengembangan wilayah perbatasan, hingga pencegahan dan rehabilitasi bencana (Syafii, 2018).

Di Provinsi Lampung, kesenjangan akses pendidikan juga masih menjadi persoalan nyata, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Keterbatasan infrastruktur pendidikan serta distribusi tenaga pendidik yang tidak merata menjadi faktor utama. Banyak sekolah di daerah terpencil masih kekurangan kualitas fasilitas dan tenaga pendidik, bahkan sebagian siswa harus menempuh jarak jauh untuk bersekolah. Kondisi ini menurunkan partisipasi pendidikan di jenjang menengah. Kesenjangan akses pendidikan di Lampung juga tidak lepas terlepas dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi membuat banyak keluarga hanya mampu menyekolahkan anak hingga ke jenjang sekolah dasar saja, sementara pada tingkat menengah dan atas angka partisipasi mulai menurun. Hal tersebut turut berpengaruh pada Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan daerah hasil pemekaran tahun 2012, sehingga masih menghadapi keterbatasan dalam pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lemah serta keterbatasan infrastruktur membuat peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan untuk pemerataan akses pendidikan.

Permasalahan kesenjangan akses pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Data pada Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional mencapai 75,02, masih terdapat kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, termasuk dalam aspek pendidikan. Di Provinsi Lampung, IPM tahun 2024 tercatat sebesar 73,13, berada di bawah rata-rata nasional. Sedangkan, Kabupaten Pesisir Barat, capaian IPM tahun 2024 hanya 66,73, dengan rata-rata lama sekolah sekitar 8,7 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara nyata masih banyak masyarakat Pesisir Barat yang hanya menempuh pendidikan hingga tingkat sekolah dasar atau menengah pertama, dan belum banyak yang melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya permasalahan nyata dalam pemerataan pendidikan, terutama akses dan kualitas pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat perkotaan.

Kabupaten Pesisir Barat sebelumnya merupakan salah satu daerah tertinggal (3T) berdasarkan penetapan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes-PDPT). Kemudian, melalui Keputusan Mendes-PDPT Nomor 490 Tahun 2024, status tersebut resmi dilepas pada Oktober 2024 (Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2024). Meskipun demikian, kesenjangan akses pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat belum sepenuhnya teratasi. Oleh karena itu, studi mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan di daerah tersebut tetap relevan.

Hambatan nyata yang berpengaruh dalam pendidikan mencakup rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, kondisi ekonomi yang sulit, akses fisik ke sekolah yang terbatas, dan minimnya fasilitas pendidikan. Untuk mengatasi itu, pemerintahan daerah harus menerapkan berbagai strategi, seperti membangun fasilitas sekolah yang memadai, memberikan beasiswa, memperbaiki akses ke sekolah, serta melakukan sosialisasi mendalam mengenai pentingnya pendidikan (Hardiasanti & Trihantoyo, 2021).

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan akses pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat melalui berbagai kebijakan, seperti program bantuan pendidikan dan pembangunan fasilitas sekolah. Meskipun berbagai program seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar), BOS (Biaya Operasional Sekolah), maupun beasiswa Afirmasi seperti ADEM (Afirmasi Pendidikan Menengah) dan Adik (Afirmasi Pendidikan Tinggi) yang telah menjangkau sebagian masyarakat, namun tantangan geografis, ekonomi, dan infrastruktur masih menghambat pemerataan akses pendidikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya implementasi kebijakan pemerintah daerah yang lebih responsif terhadap karakteristik wilayah Pesisir Barat.

Dalam pandangan administrasi publik, pendidikan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi

maupun kabupaten/kota, memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan sebagai salah satu prioritas. Artinya, pendidikan tidak bisa hanya diserahkan pada sektor swasta atau upaya masyarakat sendiri, tapi harus ada tanggung jawab dari pemerintah melalui lembaga negara. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara fungsi pemerintahan daerah dengan penyelenggaraan pendidikan, di mana peran administrasi negara juga menjadi aspek penting untuk memastikan hak pendidikan masyarakat dapat terpenuhi.

Penyelenggaraan pendidikan juga tidak lepas dari proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan sesungguhnya merupakan wujud nyata dari administrasi publik, karena di dalamnya melibatkan perencanaan program, pengalokasian anggaran, penyediaan sarana prasarana, pengangkatan tenaga pendidik, hingga pengawasan mutu pendidikan. Oleh sebab itu, keberhasilan pendidikan sebagai bentuk pelayanan publik sangat bergantung pada sistem administrasi yang efektif dan terkoordinasi. Dalam praktiknya, pelayanan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan tenaga pendidik yang tidak merata, rendahnya kualitas infrastruktur di daerah 3T, serta lemahnya pengawasan kebijakan. Faktor-faktor tersebut menjadi penghambat utama implementasi kebijakan pemerintah daerah di daerah seperti Pesisir Barat.

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain komunikasi kebijakan, sumber daya yang tersedia, serta struktur birokrasi yang menjalankan kebijakan. Faktor tersebut menjadi alat analisis utama dalam melihat praktik kebijakan pendidikan di daerah 3T, termasuk Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. Dari sisi sumber daya, keterbatasan tenaga pendidik dan fasilitas sekolah menjadi hambatan utama yang membuat kebijakan tidak berjalan optimal. Sementara itu, sikap pelaksana di lapangan, termasuk guru dan aparat daerah, sangat menentukan komitmen dalam mendorong partisipasi pendidikan (Purwanto & Sulistyastuti, 2012). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di Pesisir Barat menjadi penting,

karena dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pemerataan akses pendidikan.

Penelitian ini dilakukan karena di Kabupaten Pesisir Barat masih terdapat kesenjangan nyata antara kebijakan pemerintah daerah dan kondisi masyarakat dalam bidang pendidikan. Meskipun telah banyak kebijakan dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, implementasinya belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya, koordinasi, dan pengawasan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut?
3. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan implementasi kebijakan tersebut.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, serta pemerintah provinsi dan pusat, dalam merumuskan strategi yang lebih tepat untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai secara lebih merata di seluruh wilayah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penting dalam menyusun kerangka penelitian, karena dapat memberikan gambaran mengenai topik yang sudah pernah diteliti sebelumnya serta menunjukkan posisi penelitian yang sedang dilakukan. Kajian terhadap penelitian terdahulu juga berfungsi untuk mengidentifikasi kesamaan maupun perbedaan yang dapat dijadikan landasan dalam mengembangkan penelitian baru. Pada bagian ini disajikan beberapa penelitian relevan yang membahas implementasi kebijakan pendidikan serta kesenjangan akses pendidikan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ringkasan hasil penelitian terdahulu tersebut ditampilkan dalam tabel berikut, dengan fokus pada judul, temuan hasil, serta perbedaan penelitian.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Hasil	Perbedaan Penelitian
1.	Nasaruddin (2023), Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sinjai.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 13 Tahun 2014 memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pendidikan, baik dari infrastruktur maupun non-infrastruktur. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang dipengaruhi oleh faktor	Penelitian Nasaruddin mengkaji implementasi kebijakan pendidikan dan menyoroti faktor penghambat maupun pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun, berfokus pada Kabupaten Sinjai dan menekankan rekomendasi model <i>boarding school</i> , sedangkan penelitian ini menyoroti implementasi

		geografis, ekonomi, serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga merekomendasikan model baru berupa sekolah berasrama (<i>boarding school</i>) sebagai solusi pemerataan akses.	kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan di daerah 3T, khususnya Kabupaten Pesisir Barat Lampung.
2.	Duwi Meilina (2016), Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMAN 1 Kasui Way Kanan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BOSDA di Way Kanan berjalan sesuai prosedur melalui struktur organisasi yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang mengacu pada juklak/juknis, serta adanya sistem monitoring berkala. Program BOSDA terbukti meningkatkan angka partisipasi sekolah, mutu lulusan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Namun, terdapat hambatan berupa keterlambatan pencairan dana, ketidakdisiplinan administrasi, dan lemahnya konsistensi monitoring.	Penelitian Meilina membahas kebijakan pendidikan yang fokus pada program BOSDA di tingkat sekolah menengah di Kabupaten Way Kanan, sementara penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pemerataan akses pendidikan di daerah 3T, khususnya Kabupaten Pesisir Barat Lampung, dengan lingkup masalah yang lebih luas dari sekadar program bantuan dana.

3.	Wijayati, I. W., Danamik, F. H. S., & Prawirosastro, C. L. (2025), Kesenjangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Analisis Kebijakan dan Alternatif Solusi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil masih sangat dipengaruhi keterbatasan infrastruktur fisik maupun digital, ketidaksesuaian kebijakan, kurangnya guru terlatih, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Pandemi COVID-19 memperparah kesenjangan digital sehingga anak-anak di daerah terpencil kesulitan mengikuti pembelajaran jarak jauh. Artikel ini menawarkan solusi alternatif berupa pendidikan berbasis komunitas, penggunaan teknologi pembelajaran offline, dan kemitraan publik-swasta. Penulis menekankan perlunya kerangka kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis bukti, dengan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.	Penelitian oleh Wijayati, dkk. membahas kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil serta menyoroti peran kebijakan dan faktor penghambatnya. Namun, penelitian ini membahas secara umum di tingkat nasional dan lebih banyak memberi saran atau solusi, sedangkan penelitian ini fokus pada kasus nyata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung dengan melihat langsung bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan.
----	---	--	--

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan gambaran terkait implementasi kebijakan pendidikan dalam mengatasi persoalan akses pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Nasaruddin (2023) mengenai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur maupun non-infrastruktur. Namun, penelitian tersebut juga menegaskan adanya hambatan berupa kondisi geografis, ekonomi masyarakat, serta partisipasi masyarakat. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada fokus yang sama dalam melihat implementasi kebijakan pendidikan beserta faktor penghambat dan pendukungnya, meskipun penelitian Nasaruddin lebih menekankan pada konteks Kabupaten Sinjai, sedangkan penelitian ini berfokus pada Kabupaten Pesisir Barat.

Selanjutnya, penelitian oleh Meilina (2016) mengenai Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Way Kanan menemukan bahwa implementasi kebijakan BOSDA cukup berhasil meningkatkan partisipasi siswa, mutu lulusan, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Namun demikian, terdapat kendala seperti keterlambatan pencairan dana, lemahnya konsistensi monitoring, serta masalah administrasi. Penelitian ini relevan dengan penelitian sekarang karena sama-sama membahas implementasi kebijakan pendidikan, tetapi berbeda pada objek kajian. Jika pada penelitian Meilina menitikberatkan pada kebijakan BOSDA, maka penelitian ini lebih luas karena menelaah berbagai kebijakan yang terkait dengan pemerataan akses pendidikan di daerah 3T, khususnya Kabupaten Pesisir Barat.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Wijayati, et al. (2025) melalui artikel berjudul Kesenjangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Analisis Kebijakan dan Alternatif Solusi menegaskan bahwa kesenjangan akses pendidikan disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, minimnya guru, lemahnya kebijakan, serta faktor sosial ekonomi. Pandemi COVID-19 juga memperparah kesenjangan digital, membuat anak-anak di daerah terpencil semakin sulit mendapatkan

pendidikan berkualitas. Artikel ini menawarkan solusi berupa pendidikan berbasis komunitas, pemanfaatan teknologi offline, serta kemitraan publik-swasta. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada fokus yang sama dalam menyoroti kesenjangan pendidikan di daerah terpencil, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Wijayati bersifat kajian literatur dengan cakupan nasional, sementara penelitian ini bersifat empiris dengan fokus spesifik di Kabupaten Pesisir Barat Lampung.

2.2 Kajian Teori

Kajian teori merupakan bagian yang berisi penjelasan tentang konsep dan teori yang dipakai sebagai dasar penelitian. Teori-teori ini membantu memahami masalah, menjelaskan hubungan antar variabel, dan memberikan arah dalam menganalisis data. Dengan kajian teori penelitian memiliki kerangka yang jelas untuk menelaah bagaimana implementasi kebijakan berpengaruh terhadap kesenjangan akses pendidikan.

2.2.1 *Grand Theory*: Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya adalah seperangkat keputusan yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama. Kebijakan publik tidak hanya hadir dalam bentuk aturan tertulis, melainkan juga berfungsi sebagai pedoman yang menjaga konsistensi arah pembangunan dan menjadi pegangan bagi semua pihak yang terlibat (Desrinelti, 2021). Karena sifatnya yang fundamental, kebijakan publik dipandang sebagai salah satu instrumen utama pemerintah untuk mengarahkan jalannya pembangunan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks administrasi negara, kebijakan publik menjadi wujud konkret dari fungsi pemerintah dalam memberikan layanan publik.

Tujuan dari kebijakan publik adalah menghadirkan solusi atas masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Namun, tidak semua persoalan otomatis masuk dalam agenda kebijakan. Hanya masalah yang dianggap penting, mendesak, dan

mampu menggugah kepedulian publik yang biasanya akan direspons melalui kebijakan. Dengan demikian, perumusan masalah menjadi tahapan penting dalam proses kebijakan publik, karena dari sinilah arah dan fokus kebijakan ditentukan (Widodo, 2021).

Kebijakan publik juga dapat dipahami sebagai kerangka besar yang menaungi program dan proyek. Program merupakan turunan dari kebijakan yang lebih umum, sedangkan proyek adalah kegiatan yang lebih konkret dan terukur di lapangan. Misalnya, dalam kebijakan pemerintah daerah terdapat program pemerataan akses pendidikan, yang kemudian diwujudkan melalui proyek pembangunan ruang kelas, pelatihan guru, atau penyediaan sarana belajar. Keterkaitan yang erat antara kebijakan, program, dan proyek menuntut koordinasi yang baik. Tanpa itu, kebijakan berpotensi gagal mencapai tujuan (Kristian, 2023).

Keberhasilan kebijakan publik ditentukan oleh sejumlah faktor. Sumber daya yang memadai, baik dari aspek anggaran maupun kapasitas pelaksana, menjadi syarat utama. Selain itu, komunikasi yang efektif antar pihak terkait, struktur birokrasi yang jelas, serta komitmen dari para pelaksana juga memengaruhi keberhasilan kebijakan. Jika salah satu unsur ini lemah, maka implementasi kebijakan berpotensi menghadapi hambatan serius (Kristian, 2023). Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar hasilnya tetap relevan dengan tujuan awal dan kebutuhan masyarakat.

Dari uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa kebijakan publik merupakan kerangka strategis yang menyatukan visi, program, dan tindakan pemerintah dalam merespons masalah publik. Hal tersebut adalah proses dinamis yang melibatkan banyak aktor, membutuhkan koordinasi yang erat, serta menuntut evaluasi berkesinambungan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pemahaman teoritis ini penting sebagai pijakan awal untuk menilai bagaimana implementasi kebijakan mampu mengatasi persoalan kesenjangan akses pendidikan yang menjadi fokus penelitian ini.

2.2.2 *Middle Theory*: Teori Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (1992) dalam Maharani (2022) menyatakan bahwa “*public policy is whatever the government chooses to do or not to do.*” Kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan alasan mengapa suatu kebijakan perlu dilakukan serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik harus disusun secara bijaksana agar mampu memberikan kesejahteraan bagi warga negara dan mengurangi dampak negatif bagi masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen utama pemerintah dalam mengatur kehidupan bersama dan mencapai tujuan pembangunan.

Tahapan awal dalam proses kebijakan publik dimulai dari pendefinisian masalah atau *agenda setting*. Masalah publik yang tidak berhasil didefinisikan atau diangkat ke dalam agenda kebijakan tidak akan pernah menjadi isu kebijakan (*policy issue*). Proses inilah yang disebut Dye sebagai langkah strategis dalam kebijakan publik, karena pada tahap inilah pemerintah menentukan prioritas masalah yang layak direspons melalui kebijakan (Dye, 1992 dalam Maharani, 2022). Tahapan ini menjadi fondasi penting sebelum kebijakan diimplementasikan, karena kesalahan dalam mendefinisikan masalah akan berdampak pada efektivitas kebijakan di tahap pelaksanaan.

Dalam kajian kebijakan publik kontemporer di Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa penerapan kerangka teori seperti Dye tetap relevan. Bahwa pemerintah melakukan pilihan strategis yang mencerminkan definisi Dye yaitu melakukan atau tidak melakukan tindakan sebagai respons atas masalah publik. Proses *agenda setting* menjadi penentu utama apakah suatu isu muncul sebagai kebijakan atau tidak (Pratama et al., 2022). Tahap agenda, formulasi, implementasi, dan evaluasi saling terkait dan membentuk siklus kebijakan. Dengan demikian, teori Dye yang menekankan pilihan pemerintah menjadi dasar konseptual yang kuat untuk memahami bagaimana kebijakan publik di Indonesia terstruktur (Kurniajati, 2023).

Konteks pemerintahan daerah memperkuat relevansi teori ini. Pemerintah daerah harus membuat pilihan kebijakan yang spesifik dan relevan terhadap kondisi lokal. Hal ini menegaskan bahwa teori Dye dapat diterapkan di tingkat daerah, termasuk dalam penelitian yang fokus pada kebijakan di tingkat kabupaten/kota (Sunardi & Lestari, 2024). Karena penelitian ini menitikberatkan pada implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan, maka teori Dye digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan bagaimana kebijakan dipilih dan ditempatkan dalam agenda pemerintah daerah. Selanjutnya, untuk menganalisis faktor-pelaksanaan di lapangan (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi) akan digunakan teori implementasi kebijakan Oleh Edward III.

2.2.3 *Applied Theory*: Teori Implementasi

Implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan tahap penting setelah kebijakan dirumuskan dan ditetapkan. Sebagus apa pun rancangan kebijakan, jika tidak diimplementasikan dengan baik, maka kebijakan tersebut tidak akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Edward III (1980) dalam Subarsono (2016), implementasi dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan administratif maupun operasional yang dilakukan oleh aktor pelaksana untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam praktiknya, proses ini tidak hanya sekadar menjalankan peraturan, tetapi juga menuntut adanya koordinasi, ketersediaan sumber daya, serta kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan.

Menurut teori Edward III dalam Nurwan (2019), menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksanaan, dan struktur birokrasi. Keempat unsur ini saling berkaitan dalam menentukan efektivitas kebijakan. Disposisi dapat mencerminkan sikap dan komitmen pelaksana kebijakan untuk menjalankan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sikap positif pelaksana akan

memperkuat kinerja birokrasi, terutama jika pembagian kewenangan dalam organisasi telah tersusun dengan jelas.

Implementasi kebijakan publik sering kali menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Faktor sumber daya manusia, anggaran, komunikasi antarlembaga, hingga kondisi sosial masyarakat menjadi variabel penting yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Edward III yang menekankan bahwa komunikasi dan sumber daya merupakan elemen penting dalam menentukan efektivitas implementasi. Kurangnya pemahaman dari pelaksana di lapangan dapat menghambat pencapaian tujuan. Selain itu, jika distribusi sumber daya tidak merata, pelaksanaan kebijakan bisa timpang dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan (Agustino, 2020).

Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai proses yang dinamis, di mana tujuan yang telah dirumuskan dalam tahap perencanaan diuji langsung dalam realitas sosial. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan desain kebijakan dengan konteks lapangan. Artinya, implementasi yang efektif tidak hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga kemampuan adaptasi terhadap berbagai kendala praktis di masyarakat (Winarno, 2012).

2.3 Kajian Konseptual

Kajian konseptual pada penelitian ini bertujuan untuk memperjelas makna akses pendidikan dan kesenjangan akses pendidikan sebagai konteks utama implementasi kebijakan pemerintah daerah. Pemahaman konseptual ini penting agar analisis implementasi kebijakan tidak hanya melihat proses administratif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan keadilan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Pesisir Barat.

2.3.1 Akses Pendidikan

Akses pendidikan merupakan isu fundamental dalam kebijakan pembangunan, karena menjadi pintu utama bagi terciptanya sumber daya manusia yang

berkualitas. Kesempatan memperoleh pendidikan tidak seharusnya terhalang oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, lokasi geografis, maupun latar belakang keluarga. Prinsip keadilan pembangunan menghendaki agar setiap anak, baik di kota maupun desa, memiliki peluang yang sama dalam mengakses pendidikan. Masyarakat sudah tidak lagi memandang gender sebagai penghalang utama di tingkat pendidikan dasar. Akan tetapi, hambatan lain tetap muncul, khususnya pada jenjang menengah, di mana faktor ekonomi keluarga, biaya pendidikan, hingga keterbatasan transportasi kerap menjadi alasan anak tidak melanjutkan sekolah (Ayuningtyas, 2021). Kondisi ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kesenjangan akses.

Akses pendidikan sendiri dapat dipahami sebagai jaminan kesempatan setara bagi setiap individu untuk mendapatkan layanan pendidikan tanpa diskriminasi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pemerataan kesempatan sebagai strategi dalam menciptakan keadilan pendidikan. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai hak dasar, melainkan juga instrumen penting bagi pembangunan bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas, sumber daya manusia dapat dikembangkan untuk mendukung kemajuan sosial, ekonomi, maupun politik negara. Dengan demikian, pemerataan akses pendidikan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Suyana et al., 2024).

Persoalan pemerataan pendidikan mencakup dua dimensi: pertama, kesetaraan kesempatan untuk mengenyam pendidikan; kedua, keadilan dalam kualitas layanan pendidikan yang diterima. Meski angka partisipasi sekolah meningkat, perbedaan kualitas layanan pendidikan antara wilayah maju dan daerah terpencil masih terlihat jelas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan fasilitas, distribusi guru, serta keterbatasan infrastruktur memperparah ketidaksetaraan ini (Fatricia et al., 2023).

Peran negara dalam hal ini sangat penting, sebagaimana diamanatkan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Pemerintah melalui berbagai kebijakan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), serta program wajib belajar berusaha menjawab kesenjangan akses pendidikan. Namun, kebijakan tersebut harus terus dievaluasi agar tidak hanya bersifat administratif, melainkan benar-benar menjangkau kelompok paling rentan: anak-anak dari keluarga miskin, masyarakat di daerah terpencil, serta kelompok penyandang disabilitas. Tanpa kebijakan yang inklusif dan adaptif, tujuan pemerataan pendidikan akan sulit tercapai secara utuh.

Dengan demikian, pendidikan dan kebijakan pendidikan saling terkait erat sebagai pilar pembangunan bangsa. Pendidikan merupakan sarana mencetak generasi berkualitas, sementara kebijakan berfungsi sebagai instrumen yang menjamin kesempatan setara bagi semua warga negara. Landasan teori ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan publik di bidang pendidikan mampu, atau justru gagal, dalam mengatasi kesenjangan akses yang masih berlangsung hingga kini.

2.3.2 Kesenjangan Akses Pendidikan

Kesenjangan akses pendidikan merupakan persoalan krusial dalam pembangunan nasional. Secara normatif, konstitusi Indonesia melalui UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan dasar bahkan dipandang sebagai hak fundamental yang menjadi fondasi pembentukan karakter, pengembangan potensi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, dalam praktiknya, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam akses maupun kualitas pendidikan. Perbedaan tersebut terlihat jelas antara wilayah perkotaan dengan pedesaan, sekolah negeri dengan swasta, serta antara kelompok masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang berbeda (Patricia et al., 2025).

Kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan sering kali tidak sejalan dengan kesiapan sekolah untuk mengimplementasikannya. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman atas kebijakan baru membuat sekolah kesulitan mengintegrasikan

program ke dalam kegiatan belajar mengajar. Akibatnya, tujuan kebijakan yang seharusnya menjamin persamaan hak dalam memperoleh pendidikan justru tidak tercapai sepenuhnya. Dalam beberapa kasus, implementasi kebijakan justru memperlebar kesenjangan, karena sekolah dengan sumber daya lebih baik mampu menyesuaikan diri dengan cepat, sedangkan sekolah dengan sumber daya terbatas tertinggal (Suyana et al., 2024).

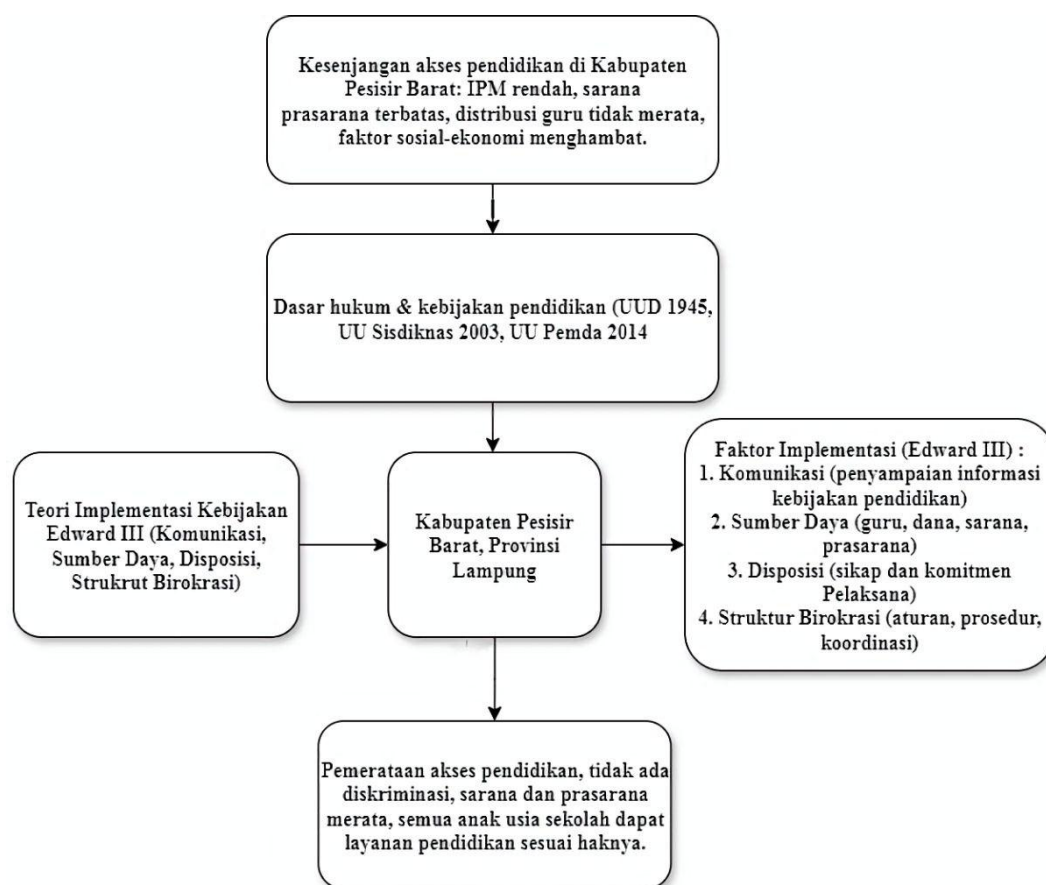
Kesenjangan akses pendidikan tidak hanya mencakup aspek kuantitas seperti angka partisipasi sekolah, tetapi juga aspek kualitas layanan pendidikan. Di banyak daerah tertinggal, masalah distribusi guru, keterbatasan fasilitas, serta minimnya infrastruktur dasar seperti listrik dan akses internet, menjadi hambatan besar bagi anak-anak untuk mendapatkan layanan pendidikan setara dengan daerah maju. Studi terbaru menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga juga berperan penting dalam memperlebar kesenjangan ini. Anak-anak dari keluarga kurang mampu lebih berisiko putus sekolah, sementara mereka yang mampu secara finansial dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang lebih tinggi (Noviani et al., 2025).

Selain faktor, dimensi sosial budaya turut memengaruhi kesenjangan akses pendidikan. Norma masyarakat, peran gender, dan ekspektasi keluarga sering kali menentukan keputusan apakah anak, terutama perempuan di daerah pedesaan, dapat melanjutkan sekolah. Pandangan bahwa pendidikan lanjutan tidak memberikan keuntungan praktis atau bahwa anak perempuan lebih baik segera menikah, menjadi hambatan non-ekonomi yang sulit diatasi dengan kebijakan administratif semata (Ayuningtyas, 2021).

2.3 Kerangka Pikir

Fenomena kesenjangan akses pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat tampak dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia, keterbatasan sarana-prasarana, distribusi guru yang tidak merata, serta hambatan sosial ekonomi masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan perlunya implementasi kebijakan pemerintah daerah yang efektif di bidang pendidikan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku (UUD 1945, UU Sisdiknas 2003, UU Pemda 2014). Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Edward III, yang menekankan empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah daerah dijalankan dalam upaya mengatasi kesenjangan akses pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan pemahaman tersebut, kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam proses implementasi kebijakan dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Penelitian kualitatif berupaya untuk menggali pemahaman mengenai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara menyeluruh serta dalam konteks yang alamiah. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari narasumber, dokumen dan hasil pengamatan di lapangan (Moleong, 2017).

Tipe penelitian deskriptif digunakan karena memungkinkan peneliti untuk menjelaskan fenomena implementasi kebijakan secara mendalam tanpa melakukan intervensi terhadap objek yang diteliti. Pendekatan ini juga membantu peneliti menelaah realitas sosial dan administratif yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan pada Kabupaten Pesisir Barat. Dengan memperoleh data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Fokus ini disusun berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980) dalam Subarsono (2016), yang

menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan teori tersebut, penelitian ini akan memusatkan fokus pada hal-hal berikut:

1. Komunikasi, yaitu bagaimana proses penyampaian informasi dan sosialisasi kebijakan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pelaksana di tingkat sekolah maupun masyarakat. Fokus ini mencakup:
 - a. Kejelasan informasi mengenai tujuan dan sasaran kebijakan
 - b. Konsistensi pesan kebijakan antara pembuat dengan pelaksana
 - c. Tingkat pemahaman para pelaksana terhadap isi kebijakan pendidikan.
2. Sumber Daya, yaitu ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan. Aspek ini meliputi:
 - a. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pendidikan
 - b. Dukungan anggaran dan sarana prasarana pendidikan yang memadai
 - c. Pemanfaatan potensi lokal untuk menunjang pelaksanaan kebijakan.
3. Disposisi, yaitu sikap, komitmen, dan kemauan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan pendidikan di daerah. Indikator yang diperhatikan mencakup:
 - a. Tanggung jawab dan dedikasi pelaksana kebijakan
 - b. Kesesuaian sikap pelaksana terhadap tujuan kebijakan
 - c. Motivasi dan kepedulian pelaksana terhadap keberhasilan kebijakan.
4. Struktur Birokrasi, yaitu sistem organisasi dan mekanisme kerja lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Fokus ini meliputi:
 - a. Pola koordinasi antarinstansi pelaksana kebijakan
 - b. Kejelasan pembagian tugas dan wewenang
 - c. Prosedur birokrasi yang mendukung atau menghambat proses implementasi.

Dengan demikian, fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana keempat faktor tersebut memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi daerah yang masih menghadapi tantangan dalam pemerataan akses pendidikan. Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu daerah yang sebelumnya berstatus sebagai daerah tertinggal (3T) dan baru resmi terentaskan dari kategori tersebut pada tahun 2024. Meskipun demikian, tantangan dalam penyediaan layanan pendidikan yang merata masih menjadi isu utama, terutama di wilayah pedalamannya yang memiliki karakteristik geografis sulit dijangkau.

Kabupaten Pesisir Barat memiliki jumlah penduduk yang tersebar di wilayah pesisir, perbukitan, dan pedalaman, dengan kondisi infrastruktur pendidikan yang belum merata. Faktor geografis yang kompleks membuat sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan dalam mengakses sekolah, baik dari sisi jarak, transportasi, maupun ketersediaan tenaga pendidik yang belum merata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pesisir Barat tercatat sebesar 66,73, masih berada di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 73,13. Angka ini menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan kesenjangan akses pendidikan.

Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat juga mempertimbangkan relevansinya dengan fokus penelitian, yakni implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kesenjangan pendidikan. Melalui lokasi ini, peneliti dapat memahami secara langsung bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan dijalankan oleh pemerintah daerah, khususnya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, serta melihat sejauh mana koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam mendorong pemerataan akses pendidikan di wilayah tersebut.

3.4 Jenis dan Sumber Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang menggambarkan pandangan, pengalaman, serta tindakan para informan. Data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu data deskriptif yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan berupa narasi, pernyataan, dan dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan. Data ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi kepada informan yang memiliki keterkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan pada Kabupaten Pesisir Barat. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, pegawai atau staf bidang pendidikan dasar dan menengah, kepala sekolah, guru, serta tokoh masyarakat dan orang tua siswa yang memahami kondisi pemerataan pendidikan di daerah tersebut. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan alat bantu seperti catatan lapangan, perekam suara, serta dokumentasi foto untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari sumber tertulis untuk mendukung dan memperkuat hasil penelitian. Data ini meliputi dokumen resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, laporan pembangunan daerah (RPJMD), data Badan Pusat Statistik (BPS), serta literatur, jurnal ilmiah, buku, dan situs web resmi pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dan pemerataan akses pendidikan. Data sekunder ini

digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai konteks penelitian serta memperkuat hasil analisis data primer.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap penting dalam penelitian, karena bertujuan memperoleh informasi yang akurat dan relevan dari sumber yang tepat. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial serta karakteristik sumber data yang sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dilakukan di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Ketiga teknik tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan di wilayah tersebut.

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas pelaksana kebijakan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, kegiatan di sekolah-sekolah, serta interaksi antara pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai situasi pendidikan, ketersediaan fasilitas, serta kendala yang dihadapi dalam pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah pesisir dan pedalaman.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh informasi langsung dari informan yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Teknik ini memungkinkan peneliti memahami pandangan, pengalaman, serta persepsi para informan terhadap pelaksanaan kebijakan yang

sedang dijalankan. Informan penelitian terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, pegawai bidang pendidikan dasar dan menengah, kepala sekolah, guru, tokoh masyarakat, serta orang tua siswa. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan terbuka yang disusun berdasarkan fokus penelitian, serta didukung oleh alat bantu seperti perekam suara dan catatan lapangan untuk menjaga keakuratan data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara dengan menelaah berbagai dokumen resmi yang relevan. Teknik ini dilakukan melalui pengumpulan, pengkajian, dan analisis terhadap dokumen-dokumen seperti laporan program pendidikan, data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, dokumen perencanaan daerah (RPJMD), dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, bahan pendukung lain seperti artikel, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dan pemerataan akses pendidikan juga digunakan sebagai sumber data sekunder. Hasil dokumentasi berfungsi untuk memperkuat temuan lapangan serta memberikan konteks empiris terhadap analisis penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian karena bertujuan mengolah data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang bisa menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian kualitatif, proses analisis tidak dilakukan setelah semua data terkumpul, melainkan berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan cara ini, peneliti bisa memahami situasi dan makna dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles et al. (2014). Model ini menjelaskan bahwa proses analisis data dilakukan secara terus-menerus

dan saling berkaitan antar tahap. Tiga tahap utama dalam model ini meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah proses memilih dan menyederhanakan informasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti memusatkan perhatian pada data yang berhubungan dengan fokus penelitian, yaitu implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat. Data yang tidak relevan dipisahkan, sementara data yang dianggap penting dirangkum agar mudah dianalisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap berikutnya adalah penyajian data, yaitu menyusun hasil kondensasi menjadi uraian yang mudah dibaca dan dipahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Bila diperlukan, penyajian data dapat dilengkapi dengan tabel, diagram, atau kutipan wawancara untuk memperjelas temuan di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menyusun pemahaman dari data yang telah disajikan dengan mencari pola dan hubungan antar temuan. Kesimpulan tidak diambil secara langsung, melainkan melalui proses berulang selama penelitian berlangsung. Hasil kesimpulan kemudian dicek kembali dengan data lapangan agar hasilnya tetap sesuai dan dapat dipercaya.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data menjadi bagian penting dalam penelitian kualitatif karena berfungsi memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar dapat

dipercaya. Tanpa uji keabsahan, hasil penelitian bisa bias dan menimbulkan kesimpulan yang salah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat kriteria keabsahan data menurut Sugiyono (2021), yaitu kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya. Beberapa cara dilakukan untuk menjamin ketepatan data. Pertama, peneliti memperpanjang waktu observasi dan wawancara di lapangan agar informasi yang diperoleh semakin lengkap dan mendalam. Kedua, peneliti meningkatkan ketelitian dengan cara memeriksa kembali hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk melihat kesesuaian antar data.

Untuk memperkuat hasil, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber, waktu, dan metode. Triangulasi teknik dilakukan dengan memeriksa kesamaan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari Kepala Dinas Pendidikan, guru, kepala sekolah, dan masyarakat. Triangulasi waktu juga dilakukan dengan mengumpulkan data di waktu berbeda agar hasilnya lebih konsisten.

2. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Uji keteralihan digunakan untuk melihat sejauh mana hasil penelitian bisa diterapkan di konteks lain. Karena itu, peneliti berusaha menyajikan gambaran yang rinci dan realistis tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat. Deskripsi yang jelas membuat pembaca bisa menilai sendiri apakah temuan ini dapat dijadikan acuan untuk wilayah lain dengan karakteristik yang mirip.

3. Uji Ketergantungan (*Dependability*)

Uji ketergantungan dilakukan untuk memastikan seluruh proses penelitian berjalan secara konsisten dan bisa dilacak kembali. Setiap tahap penelitian mulai dari perencanaan, pengumpulan data, sampai analisis, dicatat dengan rapi agar orang lain dapat memeriksa dan menilai kestabilan proses penelitian ini.

4. Uji Kepastian (*Confirmability*)

Uji kepastian bertujuan memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar berasal dari data lapangan, bukan dari pandangan pribadi peneliti. Semua hasil disusun berdasarkan bukti yang nyata seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, foto kegiatan, dan dokumen dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat. Langkah ini menjamin bahwa penelitian bersifat objektif dan dapat diuji kembali oleh pihak lain jika diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ananda, R., Yuliani, C. E., Misnati, K., Azzikra, R., Rahmadiyah, P. (2025). Analisis kesenjangan layanan pendidikan sekolah dasar antara sekolah perkotaan dan daerah 3T di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 392-404.
- Ayuningtyas, I. (2021). Ketimpangan akses pendidikan di Kalimantan Timur. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 117-129. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i2.2128>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia 2024*. Jakarta: BPS. Di akses pada 30 Agustus 2025 melalui: <https://bps.go.id>
- Desrinelti, D., Afifah, M., Gistituati, N. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83-88.
- Patricia, A. N., Febriani, S., & Ananda, R. (2025). Kebijakan Dan Permasalahan Akses Pendidikan Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 551-561.
- Hardiasanti, M., Trihantoyo, S. (2021). Implementasi wajib belajar di daerah terdepan, terluar dan tertinggal. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 1064-1077.
- Hasbullah. (2015). *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88-98. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.155>
- Kurniajati, S., Eldora, E., Wahyuningsih, A., & Sabathina, S. (2023). Literature Review: Model Analisis Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 2(1), 35-41.
- Maharani, D. (2022). *Kebijakan Publik Teori dan Aplikasi*. Jawa Barat: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Maleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Meilina, D. (2016). *Implementasi kebijakan pendidikan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan*. Tesis, Universitas Lampung.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nasaruddin, H. (2023). *Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Sinjai (Studi Kecamatan Pulau Sembilan)*. Disertasi, Universitas Negeri Makassar.
- Noviani, F. N. F., Klareza, Y., Fahmilia, D., & Koto, I. (2025). The Impact of Education Policy on Equity of Access to Education in Indonesia and New Zealand. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(4), 921-929. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i4.502>
- Nurwan, T. W. (2019). Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 201-212. <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2/176>
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.(2024). *Pesisir Barat Resmi Terentaskan dari Status Daerah Tertinggal*. Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian, Kabupaten Pesisir Barat. Di akses pada 30 Agustus 2025 melalui: <https://pesisirbaratkab.go.id/berita/pesibar-resmi-lepas-sebagai-daerah-tertinggal>
- Pratama, D. P., Putera, R. E., Koeswara, H. (2022). Analisis Formulasi Kebijakan Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2).
- Purwanto, E. A., Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putera, M. T. F., Rhussary, M. L. (2018). Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) di Kabupaten Mahakam Hulu. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 12(2), 144-148.
- Soedijarto. (2008). *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Subarsono, A. (2016). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunardi, S., & Lestari, Y. S. (2024). Model Kebijakan Pemberdayaan di Pedesaan Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 1-20. <https://doi.org/10.52316/jap.v20i1.235>
- Suyana, N., Dalmeri, D., Sugiharto, S., & Jupriadi, J. (2024). Kebijakan pendidikan nasional menghadapi tantangan global sebuah analisis strategis dan prioritas. *Journal of Education Research*, 5(1), 620-634. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.888>
- Syafii, A. (2018). Perluasan dan pemerataan akses kependidikan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 4(2), 153-171. <https://doi.org/10.26594/dirasat.v4i2.1535>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Wijayati, I. W., Damanik, F. H. S., & Prawirosastro, C. L. (2025). Kesenjangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Analisis Kebijakan dan Alternatif Solusi. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 6(3), 671-677. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss3pp671-677>
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.